

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
RUMAHAN MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI
KABUPATEN KULON PROGO**

Disusun Oleh:

NAMA : ESTI HARTATI
NPM : 2041021022
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL TUGAS AKHIR:

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI RUMAHAN
MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KULON
PROGO”**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

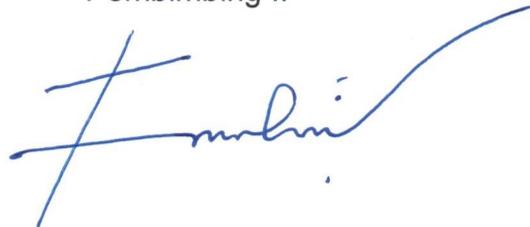
Jakarta, Desember 2023

Pembimbing I



(Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA)

Pembimbing II



(Dr. Firman Hadi Rivai, MPA)

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ESTI HARTATI
NPM : 2041021022
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI RUMAHAN MELALUI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN
KULON PROGO

Telah mempertahankan Tesis di hadapan
Tim Penguji Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta,

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2023
Pukul : 13.00 – 14.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Tim Penguji Nama

Ketua : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd

Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M.Si

Pembimbing I : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA

Pembimbing II : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA

Anggota : Dr. Asropi, M.Si



Landa Tangan

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ESTI HARTATI

NPM : 2041021022

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI RUMAHAN MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KULON PROGO", merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.

Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam paksaan.

Jakarta, Desember 2023

Yang Memberikan Pernyataan



Esti Hartati

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis dengan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo” dapat selesai, adapun penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penyelesaian penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya serta apresiasi setinggi-tingginya terutama kepada Ibu Prof.Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA, selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, MPA, selaku Dosen Pembimbing II, dan disampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd, selaku Dosen Pembahas;
2. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si, selaku Dosen Pembahas;
3. Bapak Dr. Asropi, M.Si, selaku Dosen Pembahas;
4. Segenap Dosen dan Staf Pendukung Politeknik STIA LAN Jakarta;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo;
6. Bapak Dr. Jumeri STP, M.Si, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, D.I.Yogyakarta;
7. Pendamping Pelaku Industri Rumahan Kabupaten Kulon Progo;
8. Para Pelaku Industri Rumahan di Kabupaten Kulon Progo;
9. Jajaran Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Staf Asdep PUG; Bidang Ekonomi dan Perpustakaan KemenPPPA;
10. Keluarga Tercinta, Keluarga Besar Bapak Syamsuri;
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Besar harapan, semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat. Peneliti membuka peluang sebesar-besarnya untuk masukan, saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini.

Jakarta, Desember 2023

Peneliti

ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI RUMAHAN
MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KULON PROGO

Esti Hartati
esti.hartati@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Industri rumahan merupakan salah satu jenis usaha mikro yang dikerjakan di rumah dan sebagian besar pelaku usahanya adalah perempuan, hal ini dapat memberikan peran kepada perempuan untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, menciptakan tenaga kerja dan ikut terlibat dalam pembangunan terutama di bidang ekonomi. Dalam mengembangkan industri rumahan, perlu peran serta pemerintah baik pusat maupun daerah, berdasarkan hal ini, KemenPPPA mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan, dan 21 Kab/Kota terpilih untuk dijadikan percontohan. Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah percontohan pembangunan Industri Rumahan karena tingginya angka kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan perkembangan industri rumahan yang belum optimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis penyebab ketidakefektifan pelaksanaan pembangunan industri rumahan di Kulon Progo serta strategi pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis menggunakan teori Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, dimana terdapat empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, dan karakteristik dan kemampuan lembaga pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kulon Progo belum optimal dari setiap variabel, kesadaran pola pikir pelaku usaha, pelatihan-pelatihan, koordinasi dan penganggaran sehingga diperlukannya strategi dimana kerjasama, peran dan komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan lembaga masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan yang sama dalam pembangunan industri rumahan.

Kata Kunci: Industri Rumahan, Pemberdayaan Perempuan

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF HOME INDUSTRY DEVELOPMENT POLICY
THROUGH WOMEN'S EMPOWERMENT IN KULON PROGO DISTRICT

Esti Hartati
esti.hartati@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Abstract

Home industry is a type of micro business that is carried out at home and the majority of business actors are women. This can give women a role in helping to improve family welfare, create a workforce and be involved in development, especially in the economic sector. In developing home industries, the participation of both central and regional governments is needed, based on this, the Ministry of PPPA issued Ministerial Regulation Number 2 of 2016 concerning General Guidelines for the Development of Home Industries to Improve Family Welfare through Women's Empowerment, and 21 Districts/Cities were selected to become pilots. Kulon Progo Regency is one of the pilot areas for Home Industry development because of the high poverty rate. In its implementation, Kulon Progo Regency shows that the development of home industries is not yet optimal. The aim of the research is to analyze the causes of non-optimal implementation of home industry development in Kulon Progo as well as implementation strategies. This research is a qualitative approach by analyzing using the theory of Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, where there are four variables that can influence the performance and impact of a program, namely environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, and the characteristics and capabilities of implementing institutions. The results of the research show that the implementation of home industry development through women's empowerment in Kulon Progo Regency has not been optimal in terms of every variable, awareness of the mindset of business actors, training, coordination and budgeting so that a strategy is needed where cooperation, roles and joint commitment between government, academics, actors Businesses and community institutions are very important to achieve the same goals in developing home industries.

Keywords: Home Industry, Women Empowerment

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	32
1. Tinjauan Kebijakan	32
2. Tinjauan Teoritis	36
a. Administrasi Publik	36
b. Kebijakan Publik	40
c. Pemberdayaan Perempuan	54
d. Industri Rumah Tangga	62
C. Operasionalisasi Konsep	68
D. Kerangka Berpikir	70
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	71
B. Teknik Pengumpulan Data	73
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	79
D. Instrumen Penelitian	80
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Lokasi Fokus Penelitian	81
B. Hasil dan Pembahasan	82
1. Kebijakan Pembangunan Industri Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo belum Optimal	82

2. Strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo	97
--	----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	103
----------------------	-----

LAMPIRAN



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Faktor-Faktor Pendukung Pembangunan Industri Rumahan	11
Tabel 1.2	Data Pembangunan Industri Rumahan di Pulau Jawa Tahun 2016-2018	12
Tabel 1.3	Hasil Pemetaan Pembangunan Industri Rumahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017	15
Tabel 1.4	Data Perkembangan Industri Rumahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2021	15
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2.2	Klasifikasi Industri Rumahan	65
Tabel 3.1	Sumber Informasi/Informasi Kunci	75
Tabel 4.1	Jumlah Perempuan di Lokasi Pembangunan Industri Rumahan Kabupaten Kulon Progo	81

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	<i>Economic Participation and Opportunity Rank Southeast Asia</i>	2
Grafik 1.2	Labour Force Participation	2
Grafik 1.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	3
Grafik 1.4	Garis Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo	13



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan	43
Gambar 2.2 Proses Implementasi Program Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli	42
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Donald Van Meter dan Carel Van Horn	51
Gambar 2.4 Faktor Penentu Implementasi Menurut Edward III	52
Gambar 2.5 Kerangka Berpikir	70

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pemberdayaan perempuan di segala aspek pembangunan. Perempuan harus memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan, guna tercapainya SDM bangsa yang unggul. Peningkatan SDM diantaranya melalui peningkatan kualitas perempuan.

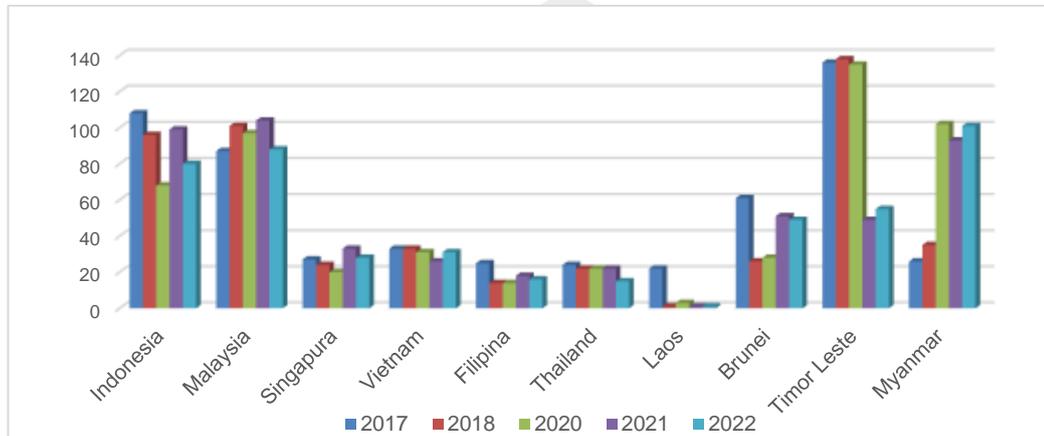
Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu cara strategi untuk meningkatkan peran perempuan dan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya, baik di ranah publik maupun domestik. Kesadaran tentang peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya diikutsertakan dalam pembangunan.

Budaya patriarki di masyarakat Indonesia masih menjadi tantangan perempuan turut serta dalam pembangunan. Perempuan masih dianggap sebagai obyek pembangunan, padahal keterlibatan perempuan sebagai subyek pembangunan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Menurut Usman (2010) secara normatif, kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sejajar. Akan tetapi, dalam kehidupan nyata seringkali terdapat apa yang lazim disebut dengan istilah *gender stratification* yang menempatkan status perempuan dalam tatanan hierarkis pada posisi subordinan, atau tidak persis sejajar dengan posisi kaum laki-laki. Dibandingkan dengan perempuan, laki-laki memperoleh akses yang lebih besar baik kepada sumber-sumber ekonomi dan politik. (Hamid, 2018)

Secara umum, sampai saat ini perempuan masih tertinggal dari laki-laki baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pada *Global Gender Gap Report World Economic Forum* dari tahun 2017 – 2022 terlihat bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya pada kesempatan

dan partisipasi ekonomi di Indonesia masih tinggi. (*Reports | World Economic Forum, n.d.*) (grafik 1.1)

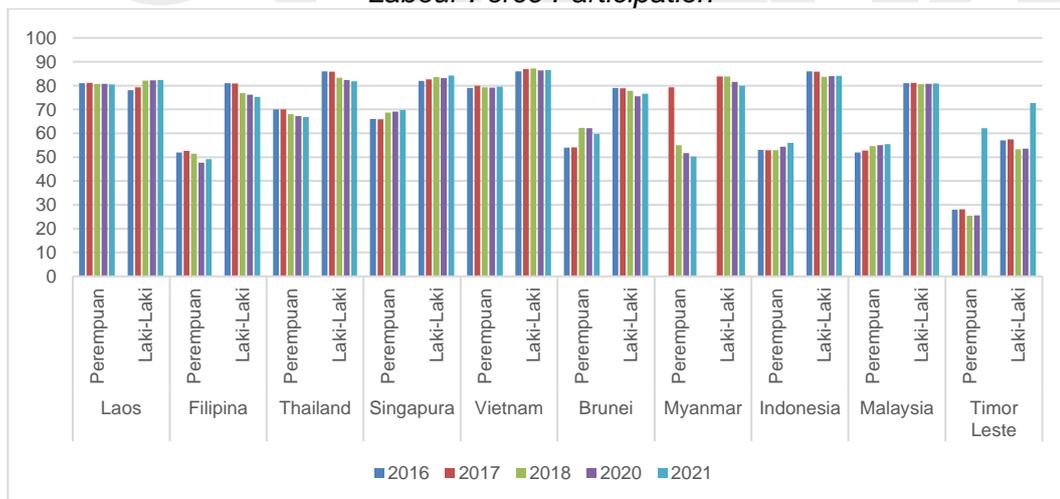
Grafik 1.1
Economic Participation and Opportunity Rank Southeast Asia



Sumber: *World Economic Forum (2017-2022)* diolah

Berdasarkan data *world economic forum*, terlihat Laos, Filipina dan Singapura merupakan negara yang memiliki kesenjangan kecil di bidang ekonomi, dan Indonesia bersama Malaysia dan Timor Leste menjadi 3 negara yang memiliki kesenjangan tinggi di bidang ekonomi. Indikator pengukuran kesenjangan di bidang ekonomi, diantaranya partisipasi tenaga kerja dan kesetaraan upah di pekerjaan yang sama. (grafik 1.2)

Grafik 1.2
Labour Force Participation



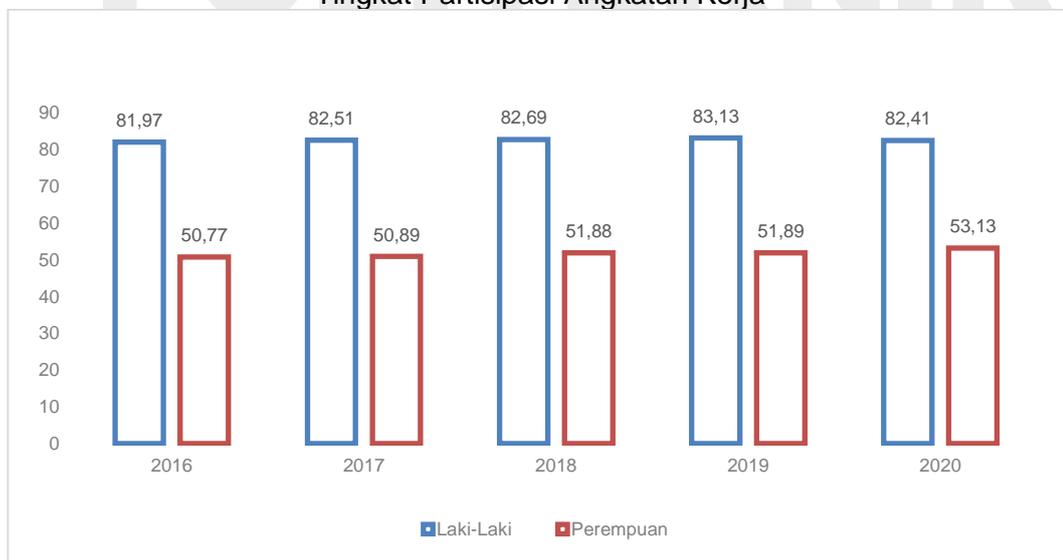
Sumber: *World Economic Forum (2016-2021)* diolah

Partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dari perempuan dapat dilihat di hampir semua negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia kesenjangan partisipasi Angkatan kerja masih cukup tinggi dan dilihat dari peringkat, Indonesia masih termasuk terbawah diantara negara-negara di Asia Tenggara lainnya.

Ketimpangan antara pekerja perempuan dan laki-laki dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain faktor budaya yang membuat laki-laki mempunyai peluang besar untuk melakukan kegiatan ekonomi sedangkan perempuan memiliki keterbatasan. Selain itu, diskriminasi gender terhadap suatu pekerjaan yang hanya dapat dimiliki oleh salah satu jenis kelamin dapat mempengaruhi tingkat upah/gaji pada pasar tenaga kerja. Peningkatan kompetensi perempuan dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada salah satu jenis kelamin dapat memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data Susenas, dalam 5 tahun terakhir terlihat bahwa setiap tahun partisipasi perempuan dalam bekerja terus mengalami peningkatan tetapi masih jauh di bawah laki-laki.

Grafik 1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Sumber: Sakernas 2016 – 2020 (data diolah)

Tuntutan budaya yang mendorong perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan. Perempuan dikonstruksikan bertanggungjawab di ranah domestik sehingga tidak memprioritaskan kegiatan perempuan di sektor ekonomi di wilayah publik. Melihat jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yang mencapai sekitar setengah penduduk Indonesia, maka kontribusi perempuan di bidang ekonomi sangat penting.

Program pemberdayaan perempuan berbasis usaha mikro dan kecil merupakan salah satu program yang dapat memberikan akses dan penguatan ekonomi. Aspek penting dalam penguatan yaitu memberikan akses seluas-luasnya kepada perempuan untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satu usaha mikro dan kecil yang masih membutuhkan perhatian pemerintah adalah Industri Rumahan yang berada di sistem ekonomi rumah tangga yang banyak melibatkan kaum perempuan dan masih banyak negara memasukkan pada kategori sektor informal.

Pada pendekatan pemberdayaan perempuan, diasumsikan bahwa jika ingin memperbaiki posisi perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk tawar-menawar dan untuk merubah sendiri nasibnya. Artinya, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan tidak saja sebagai objek tetapi juga sebagai pelaku aktif, sebagai orang yang ikut merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. (Saptandari, n.d.)

Zakiah mengutip Anwar (2007), konsep pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau pemberian daya dalam bentuk pendidikan yang tujuannya untuk membangkitkan kesadaran, kepekaan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik sehingga pada akhirnya mereka mampu memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya di masyarakat. Lingkup dari pemberdayaan ini tidak hanya pada level individu namun juga pada level masyarakat dan pranatanya yaitu menanamkan pranata nilai-nilai budaya seperti kerja keras, keterbukaan, tanggung jawab dan lainnya. Dua ciri dari pemberdayaan perempuan, adalah sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam

pembangunan; dan sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.(Zakiah, 2010)

Menurut Sumodiningrat (1999) bahwa tujuan pemberdayaan perempuan ada 3, yaitu: Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri; Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menurut pada laki-laki; Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik di sektor publik maupun domestik.(Sumodiningrat, 1999)

Pemberdayaan perempuan saat ini juga bisa menjadi penggerak ekonomi baik untuk ekonomi keluarga, lingkungan maupun negara melalui pemberdayaan ekonomi perempuan dengan melibatkan perempuan pada program-program usaha mikro dan kecil seperti industri rumahan. Pemerintah terus meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dengan membuat kebijakan-kebijakan yang membuka kesempatan kepada perempuan untuk dapat mengembangkan kemampuan dan berpartisipasi dalam penguatan ekonomi.

Myrtle Faye Laberinto Solina dalam jurnalnya menulis tentang usaha perempuan yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam jurnalnya menunjukkan bahwa UMKM Filipina menjadi penggerak ekonomi, melalui Biro Usaha Kecil dan Menengah, Departemen Perdagangan Filipina yang bertindak sebagai Sekretariat Dewan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan diatur dalam Republic Act (RA) No.6977, atau Magna Carta untuk UMKM, mereka mengembangkan dan mengimplementasikan program dan proyek yang menjawab kebutuhan khusus UMKM. Program dan proyek ini mencakup bidang pengembangan dan transfer teknologi, pembiayaan, pemasaran, dan pelatihan. Biro Usaha Kecil dan Menengah diberi mandat untuk mempromosikan dan mengembangkan UMKM di dalam negeri dan juga bertugas untuk menilai dan mengusulkan kebijakan dan strategi yang diarahkan

untuk kemajuan UMKM di bidang pengembangan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan produktivitas.

Singapura juga menjadi salah satu yang mendukung usaha perempuan seperti yang ditulis Myrtle, pada tahun 2018, Departemen Statistik Singapura mempresentasikan bahwa UKM merupakan 99% dari total perusahaan dan menghasilkan hampir 69% dari total lapangan kerja di Singapura. Enterprise Singapore adalah lembaga pemerintah utama yang mendukung pengembangan perusahaan, mereka fokus pada membangun kapabilitas, inovasi dan internalisasi perusahaan yang berkomitmen, mereka juga menawarkan berbagai bantuan untuk UMKM, diantaranya bantuan keuangan, akses pasar dan *talent assistance* adalah yang paling populer. Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) 2018 mencantumkan Singapura sebagai negara terbaik kelima dengan kondisi pendukung paling kuat dan peluang bagi perempuan untuk berkembang sebagai usaha. Selain itu, perempuan di Singapura menempati peringkat teratas dalam hal pengetahuan dan akses keuangan. Singapura juga menawarkan salah satu kondisi yang paling kondusif untuk mendorong kepemilikan usaha perempuan, seperti kemudahan berbisnis dan opini budaya perempuan sebagai pengusaha. (MFL Solina -2020, n.d.)

Selain Filipina dan Singapura, dalam jurnal lain meneliti pengembangan kewirausahaan perempuan di Malaysia, dalam rencana strategis Malaysia, Kementerian Pembangunan Perempuan, dan Masyarakat, pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kontribusinya dalam sosial ekonomi menjadi daya dorong strategis utama strategis Malaysia. Dorongan strategis ini disiapkan sesuai dengan kebijakan dan rencana aksi perempuan nasional untuk memastikan pengembangan dan pemberdayaan perempuan di Malaysia. Diantara strategi yang telah dilaksanakan adalah penghapusan kebijakan, hukum dan prosedur yang mendiskriminasikan perempuan, pemberdayaan status ekonomi perempuan dengan meningkatkan partisipasi mereka dalam pekerjaan dan kewirausahaan, serta meningkatkan persentase perempuan yang terlibat dalam pos pengambilan keputusan hingga minimal persen. Beberapa program menargetkan setidaknya 1.000 perempuan terlibat dalam program pengembangan kewirausahaan setiap tahunnya, implementasi

pengaturan kerja yang fleksibel dan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas penitipan anak bagi ibu yang bekerja. Selanjutnya Departemen Pembangunan Perempuan telah memulai berbagai program untuk meningkatkan tingkat sosial ekonomi perempuan.(Ariffin & Baqutayan, 2020)

Dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan usaha perempuan sangat diperlukan, usaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi motor penggerak ekonomi. Singapura, Filipina dan Malaysia terus mengembangkan kemampuan perempuan dan melibatkan pihak-pihak lain selain pemerintah untuk terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan usaha perempuan. Hal ini dapat menjadi masukan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, peran dan dukungan pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk perkembangan usaha perempuan.

Selain ketiga negara di Asia Tenggara di atas, negara lain yang mempunyai usaha ekonomi dalam bentuk Industri Rumahan diantaranya India, India mempunyai jenis usaha yang menjadi lima besar Industri Rumahan di India, yaitu tenun kapas, tenun sutera, pembuatan karpet, industri kulit dan industri pemrosesan makanan (Joy & Melba, 2013). Dalam pengembangan industri rumahan di India, Pemerintah India telah melakukan beberapa tahapan program, yaitu :

- Pengembangan agensi-agensi di tingkat lokal (desa) untuk membantu industri rumahan yang ada;
- Penyediaan fasilitas kredit disalurkan kepada pelaku usaha melalui beberapa institusi. Industri rumahan, mikro, dan kecil menjadi sektor prioritas yang memperoleh penyaluran kredit.
- Pengembangan kawasan industri dan proyek industri pedesaan yang diselenggarakan melalui kerja sama industry.
- Pemerintah memesan produk dari usaha industri rumahan dengan tujuan mengembangkan usaha para pelaku industri rumahan
- Pengembangan layanan satu atap di setiap distrik untuk dapat memberikan layanan dan dukungan kepada para pelaku usaha hingga tingkat desa.

Kondisi India yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan Industri Rumahan di Indonesia. Salah satu

yang dapat dipelajari adalah bagaimana sistem kelembagaan pengembangan industri rumahan di India dibangun atas dasar kerjasama industri. Untuk kasus di Indonesia, memposisikan industri rumahan sebagai bagian tak terpisahkan dari industri menengah, kecil, dan mikro dan bahkan industri besar yang ada di sekitarnya dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengembangan industri rumahan sebagai upaya pemberdayaan perempuan sekaligus pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, Pemerintah Indonesia telah membuat program baik melalui instansi pemerintah maupun bekerjasama dengan lembaga non pemerintah, salah satunya yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah ialah Kementerian Perindustrian telah melakukan sejumlah inisiatif untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan dan meningkatkan proporsi perempuan dalam angkatan kerja. Kementerian Perindustrian telah bekerjasama dalam berbagai proyek dengan sektor swasta dan pihak pemerintah lainnya untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan. (Kemenperin, 2023)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi. Kebijakan ini melakukan sinergi program-program yang ada pada sektor-sektor terkait dengan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Selanjutnya perhatian pemerintah kepada pelaku industri rumahan atau bisa disebut usaha super mikro, dimana usaha ini mudah dimasuki dan keluar oleh pelaku usaha, bersifat informal, kurang mendapat pendampingan secara berkelanjutan dan belum ada perlindungan. KemenPPPA juga telah kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, antara lain dengan *Womenpreneurs Indonesia Network* (WIN) dan PT PNM melalui Program Mekaar, dimana kerjasama ini sebagai wadah bersama untuk pemberdayaan dan penguatan jaringan serta memastikan akses finansial yang inklusif bagi usaha mikro dan ultra mikro perempuan secara berkelanjutan.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan peran perempuan dalam perekonomian di Indonesia tidak diragukan lagi, sebagian besar pelaku usaha mikro adalah perempuan. Pemberdayaan perempuan

dalam perekonomian perlu didorong dengan keberadaan kebijakan serta peraturan terkait UMKM yang mendukung perempuan. Perempuan tidak lagi dilihat sebagai pemain sekunder, tetapi sebagai pemain utama untuk keberlangsungan dan keberlanjutan usaha. Usaha mikro merupakan bentuk sistem ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin ketahanan nasional secara berkelanjutan. Jenis usaha mikro yang banyak dijumpai, terutama di pedesaan dan daerah tertinggal adalah sektor industri rumahan, dimana potensi dan aktivitas pekerjanya sebagian besar adalah kaum perempuan. (KemenPPPA, n.d.-a)

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana perempuan dapat berdaya dan perannya tidak diragukan lagi terutama dalam usaha mikro dimana sebagian besar pelaku usahanya adalah perempuan, berdasarkan data KemenKop UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta dan 64% dimiliki dan dipimpin oleh perempuan, sehingga perlu untuk menganalisis implementasi pelaksanaan salah satu kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan yang telah dirancang oleh KemenPPPA seperti kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui industri rumahan.

KemenPPPA melihat bahwa Industri Rumahan merupakan potensi besar yang ada di masyarakat jika dikelola dengan baik, akan memberi manfaat yang sangat signifikan untuk peningkatan kemampuan dan ketahanan ekonomi masyarakat. KemenPPPA sangat berkepentingan karena banyak pelaku usaha Industri Rumahan adalah perempuan dan mereka harus ditingkatkan kemampuannya agar nilai tambah dari pekerjaan mereka meningkat dan dapat memberikan lebih banyak peluang untuk memajukan dirinya.

Peran dan peningkatan kemampuan perempuan juga ditulis dalam telaahan yang dilakukan KemenPPPA bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, dalam telaahannya menulis bahwa perempuan berperan penting dalam pembentukan kehidupan keluarga yang kokoh sehingga tidak terkena pengaruh negatif dari perubahan serta pencapaian suatu keadaan yang sehat dan sejahtera. Kemampuan dan potensi yang memadai dari perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga merupakan aspek terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan adopsi yang berkaitan dengan strategi peningkatan kemampuan dan potensi

kaum perempuan sehingga perempuan dapat berperan optimal di sektor domestik secara profesional. (KemenPPPA & IPB, 2018)

KemenPPPA bersama dengan Institut Pertanian Bogor telah melakukan penelitian yang membuktikan bahwa Industri Rumahan dapat membantu peningkatan kesejahteraan keluarga, menyerap dan menciptakan tenaga kerja, dan mengurangi tenaga kerja informal di luar negeri yang kerap kali menjadi sasaran perdagangan orang. Industri Rumahan mempunyai potensi besar dalam memperkuat ketahanan keluarga, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, serta dapat menciptakan relasi keluarga yang lebih harmonis. Industri rumahan juga mendorong kemandirian perempuan di bidang ekonomi yang berdampak pada pengambilan keputusan.

Kebijakan dan implementasi kebijakan publik terkait industri rumahan perlu ditingkatkan agar koordinasi pembinaan industri rumahan berjalan secara efektif sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dimana 60-70% adalah tenaga kerja perempuan. Selain itu, koordinasi lintas sektoral untuk pembinaan sumber daya manusia, teknologi, permodalan dan informasi akan memperkuat ketahanan (KemenPPPA, 2016b). Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan, sejalan dengan kegiatan dan kebijakan pemerintah melalui KemenPPPA dalam upaya mengakhiri tiga pokok yang disebut 3ENDs, 1) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) mengakhiri perdagangan manusia; 3) mengakhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Upaya untuk mengembangkan Industri Rumahan juga dipicu oleh kebutuhan lapangan kerja dan penghasilan yang akan mengurangi resiko perempuan untuk masuk pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, seperti pekerja migran tanpa persiapan yang cukup. (KemenPPPA, 2016a)

Perempuan belum memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kapasitas ekonominya secara mandiri, walaupun perempuan sesungguhnya dapat menjadi mitra strategis untuk mengembangkan perekonomian daerah/pedesaan melalui Industri Rumahan (*home industry*), sesuai dengan hasil penelitiannya, Usaha yang dipimpin oleh seorang perempuan bisa menjadi media pembelajaran bagi semua kalangan masyarakat sehingga usahanya memberikan kemanfaatan ekonomi dan juga sosial-budaya. (Kusumaningrum, n.d.)

Kebijakan Pembangunan Industri Rumahang yang digagas KemenPPPA, telah diperkuat oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahang untuk Meningkatkan Kesejahteraan melalui Pemberdayaan Perempuan, peraturan ini sebagai acuan bagi pemerintah dan para pihak yang berkepentingan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan industri rumahang. Sebagai percontohan, dipilih 14 Kab/Kota pada tahun 2016 dan 7 Kab/Kota pada tahun 2017 yang tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, untuk melaksanakan pembangunan Industri Rumahang yang nantinya akan menjadi *role model* di daerah-daerah lain.

Berikut data yang diperoleh terkait faktor-faktor pendukung Program Pembangunan Industri Rumahang di Pulau Jawa:

Tabel 1.1
Faktor-Faktor Pendukung Pembangunan Industri Rumahang

No	Daerah	Peran Tim IR Daerah			Peran Pendamping		Perkembangan IR	
		Koordinasi Internal Tim Daerah	Support Budget	Replikasi di Desa Lain	Kemampuan	Teknik dan Hasil	Kenaikan Level IR	Rata-Rata Kenaikan Omzet
1	Kabupaten Kendal	√	√	√	√	√	√	√
2	Kabupaten Rembang	√	√	√	√	√	√	√
3	Kabupaten Wonosobo	√	√	√	√	√	√	√
4	Kabupaten Kulon Progo	-	-	-	√	-	√	√
5	Kabupaten Tulungagung	√	√	√	√	√	√	√
6	Kota Cilegon	√	√	√	√	√	√	√
7	Kabupaten Cirebon	-	√	√	√	√	√	√

Sumber: Laporan Evaluasi Industri Rumahang

Berdasarkan data di atas, terlihat peran tim industri rumahang di daerah dan peran pendamping sudah optimal hampir di seluruh Kab/Kota yang menjadi

percontohan, hanya ada 2 Kab/Kota yang belum optimal secara keseluruhan, yaitu Cirebon masih perlu dievaluasi terhadap koordinasi internal di tim daerah, Kabupaten Kulon Progo masih belum terlihat optimal hampir di seluruh faktor pendukung pembangunan industri rumahan. Peran tim daerah dan peran pendamping sangat penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan industri rumahan.

Tabel 1.2
Data Pembangunan Industri Rumahan Percontohan di Pulau Jawa
Tahun 2016-2018

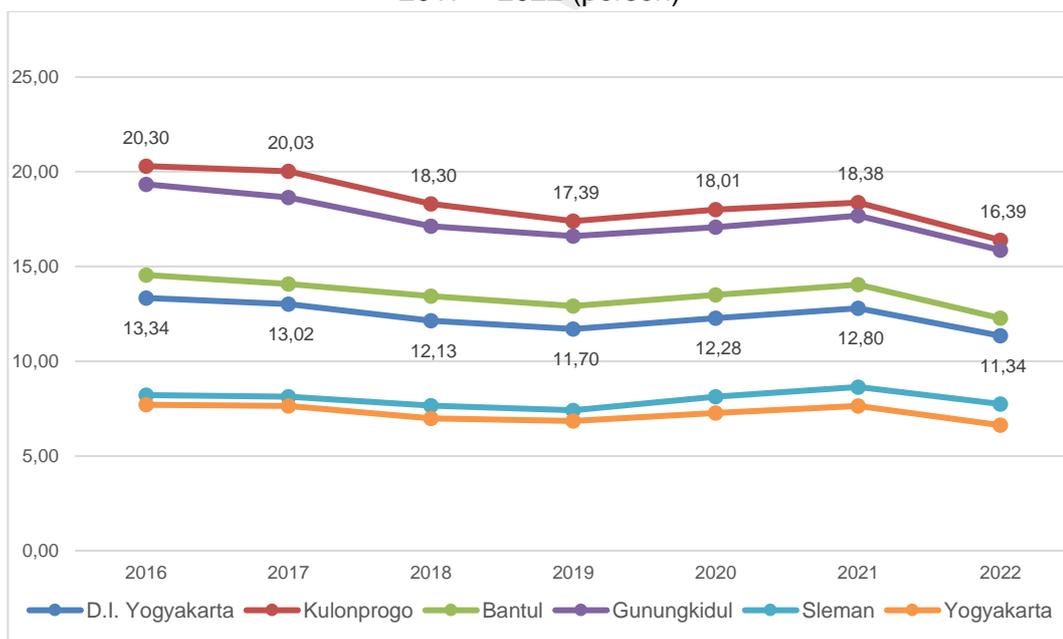
No	Kabupaten	2016				2017				2018				
		IR 1	IR 2	IR 3	Total	IR 1	IR 2	IR 3	Total	IR 1	IR 2	IR 3	I K M	Total
1	Kabupaten Wonosobo	1	129	20	150	0	118	27	145	5	235	40	-	275
2	Kabupaten Tulungagung	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
3	Kabupaten Rembang	119	31	0	150	86	48	13	147	6	108	32	-	140
4	Kabupaten Kendal	1	149	-	150	-	118	32	150	-	101	45	4	150
5	Kabupaten Cirebon	-	83	17	100	-	79	21	100	-	70	29	1	100
6	Kabupaten Kulon Progo	-	-	-	0	7	70	17	94	3	68	18	-	89
7	Kota Cilegon	85	65	-	150	17	125	-	142	10	127	13	-	140

Sumber: Data Pembangunan Industri Rumahan (diolah)

Berdasarkan data dari laporan evaluasi yang dilakukan oleh KemenPPPA, terlihat bahwa perkembangan Industri Rumahan di Kabupaten/Kota yang menjadi percontohan di Pulau Jawa, bahwa ada beberapa Kab/Kota yang mengalami penurunan jumlah pelaku Industri Rumahan tetapi terlihat juga peningkatan klasifikasi dari setiap Kab/kota. Dari 7 Kab/Kota di Pulau Jawa yang menjadi percontohan, berdasarkan evaluasi dari tim KemenPPPA, Kabupaten Kulon Progo termasuk salah satu Kabupaten percontohan yang belum menunjukkan perkembangan pembangunan industri rumahan, perlu diketahui bahwa Kabupaten Kulon Progo dipilih menjadi daerah percontohan pada tahun 2017.

Data-data di atas menjadi dasar pemilihan Kabupaten Kulon Progo sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis implementasi pembangunan industri rumahan yang dirancang KemenPPPA karena dinilai belum menunjukkan adanya optimalisasi dan perkembangan. KemenPPPA memilih Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah percontohan pembangunan industri rumahan berdasarkan tingginya angka kemiskinan di Kulon Progo sehingga KemenPPPA ingin mendorong dan mengembangkan pembangunan Industri Rumahan. Berdasarkan data BPS 2016, Kulon Progo merupakan daerah dengan jumlah miskin tinggi 20,30%, pada tahun 2016-2017 menurut BPS kemiskinan di Kulon Progo dianggap tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan Industri Rumahan ini diharapkan dapat mendorong rakyat untuk mandiri secara ekonomi dan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangganya. (KemenPPPA, 2019)

Grafik 1.4
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo
2017 – 2022 (persen)



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta

Grafik 1.4 memperlihatkan grafik persentasi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo semakin menurun setiap tahunnya tetapi masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini

menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022, Kabupaten Kulon Progo masih menjadi daerah dengan jumlah miskin tertinggi di D.I. Yogyakarta. Pembangunan industri rumahan juga merupakan sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi rumahan, program pembangunan industri rumahan yang dikelola oleh kaum perempuan ataupun menjadi tempat bekerjanya kaum perempuan tidak dapat dilepaskan dari program-program penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo tersebut mendasar pada Nota Kesepahaman antara KemenPPPA dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembangunan Industri Rumahan bagi Perempuan di Kabupaten Kulon Progo Nomor: 19/KPP-PA/D.I/06/2017 dan Nomor: 26/MoU.KP/HKM/2017, selanjutnya Nota Kesepahaman ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Asisten Deputi urusan Ekonomi, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian PPPA dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Nomor SPK-15/PPK/Satker.Dep.KG/Asdep2/06/2017 dan Nomor 460/2778/PKS/Dinsos.KP/1017.

Lokasi pembangunan industri rumahan di Kulon Progo mencakup 5 Desa dari 3 Kecamatan, yaitu Desa Ngentakrejo, Desa Bumirejo, Desa Tuksono, Desa Sukoreno, dan Desa Pendoworejo (Tabel 1.3). Pemilihan lokasi tersebut merupakan wilayah yang dianggap miskin tetapi mempunyai potensi industri rumahan yang bisa dikembangkan. Jenis usaha Industri Rumahan di Kabupaten Kulon Progo, mayoritas adalah produksi olahan pangan, selanjutnya kerajinan dan menjahit. Pelaku industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo keseluruhannya adalah Perempuan dan 13% diantaranya merupakan perempuan kepala keluarga ataupun sebagai tulang punggung keluarga.

Tabel 1.3
Hasil Pemetaan Pembangunan Industri Rumahan di Kulon Progo
Tahun 2017

No	Desa	Jumlah			
		IR	IR-1	IR-2	IR-3
1	Ngentakrejo, Kecamatan Lendah	20	0	17	3
2	Bumirejo, Kecamatan Lendah	20	0	16	4
3	Tuksono, Kecamatan Sentolo	19	0	12	7
4	Sukoreno, Kecamatan Sentolo	15	0	12	3
5	Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo	20	7	13	0
Jumlah		94	7	70	17

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengembangan Pelaku IR

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan dalam pasal 9 yaitu ukuran keberhasilan pembangunan industri rumahan dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku atau jumlah industri rumahan yang menjadi usaha kecil di seluruh daerah secara merata dan berkesinambungan dan juga tercapainya tujuan pembangunan Industri Rumahan adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif yang dikerjakan di rumah dengan dukungan anggota keluarga serta mengembangkan industri kreatif yang menjadi kekuatan perempuan dalam industri rumahan serta mendorong penguatan jaringan Industri Rumahan.

Tabel 1.4
Data Perkembangan Industri Rumahan
di Kabupaten Kulon Progo

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Industri Rumahan (IR) 1	7	3	-	-	3
Industri Rumahan (IR) 2	70	68	-	-	64
Industri Rumahan (IR) 3	17	18	-	-	18
Jumlah	94	89	-	-	85

Sumber: Laporan Pelaksanaan Industri Rumahan (diolah)

Berdasarkan dari tolak ukur keberhasilan pembangunan Industri Rumahan yaitu dilihat dari adanya peningkatan dalam kategori usaha Industri Rumahan dan meningkatnya jumlah pelaku atau jumlah industri rumahan yang menjadi usaha kecil di seluruh daerah secara merata dan berkesinambungan, apabila dilihat dari data di atas maka Pembangunan Industri Rumahan belum terlihat optimal karena belum adanya perkembangan yang signifikan dan berkesinambungan, pada tahun 2019-2020 tidak dilakukan pendataan pelaku usaha industri rumahan, pendataan dimulai kembali pada tahun 2021, dan terlihat bahwa jumlah pelaku usaha industri rumahan menurun, baik dilihat dari setiap kategori maupun dari jumlah keseluruhan.

Dari data dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis perlu melakukan penelitian mendalam tentang pelaksanaan program Industri Rumahan di Kabupaten Kulon Progo sehingga penulis mengambil judul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Kulon Progo menjadi percontohan dalam Pembangunan Industri Rumahan, berdasarkan data yang telah dilakukan, terlihat bahwa pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal dan berkesinambungan.
2. Ukuran keberhasilan pembangunan industri rumahan berdasarkan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan, salah satunya yaitu dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku industri rumahan tetapi apabila dilihat dari data peningkatan kategori usaha industri rumahan, pembangunan industri rumahan belum terlihat signifikan.
3. Keberhasilan implementasi suatu program/kebijakan memerlukan interaksi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal, berdasarkan data yang diperoleh, koordinasi internal daerah masih belum efektif.
4. Anggaran menjadi salah satu dukungan yang sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan, keberlangsungan dan keberlanjutan suatu program/kebijakan,

sehingga perlu untuk diperhatikan. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan industri rumahan, berdasarkan data masih belum terlihat.

5. Replikasi suatu program di daerah menjadi harapan dari setiap pembuat kebijakan, dimana ini bisa menjadi petunjuk bahwa program/kebijakan telah berjalan dan bermanfaat dan pembangunan industri rumahan di Kulon Progo tidak terlihat adanya replikasi di daerah/desa lain.
6. Data yang akurat dan akuntabel menjadi hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk melihat keberhasilan suatu program/kebijakan, untuk pengembangan industri rumahan di Kulon Progo, belum menunjukkan data terbaru untuk pelaku usaha industri rumahan.
7. Pendampingan pelaku usaha pada industri rumahan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dan keberlanjutan program/kebijakan, pada pembangunan industri rumahan di Kulon Progo, untuk hasil dari pendampingan belum terlihat efektif.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo belum optimal?
2. Bagaimana strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian Implementasi Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Untuk menganalisis penyebab belum optimal pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam memaksimalkan Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dengan mengetahui Implementasi Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan di Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat memperkaya/menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang teori implementasi, model implementasi, teori kebijakan publik, strategi kebijakan pembangunan industri rumahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan Rekomendasi bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo untuk dapat mengembangkan kebijakan pembangunan Industri Rumahan yang lebih optimal dan berkesinambungan.

